



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**BPBD PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



NOMOR: 300.2.1 / / BPBD-I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	26
2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Awal RKPD.....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III. TUJUAN, SASARAN	35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	37
3.3. Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	46
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	46
BAB V. PENUTUP	55

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dapat diselesaikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah diamanatkan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai oleh masing-masing provinsi pada tahun yang direncanakan sebagai penjabaran RPD pada tahun yang direncanakan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kerangka makro rencana pembangunan jangka menengah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang penjabarannya berpedoman pada Rencana Strategis yang efektif dan efisien yang mampu menghasilkan dampak pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan dampak lingkungan lainnya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang serta penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan pendapat sehingga tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, diucapkan terima kasih.

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala Pelaksana,

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508141998031006

BAB I

PENDAHULUAN

Periode Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 akan memasuki tahap kedua dalam pelaksanaannya. Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis, menjadi lanjutan dari kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi melalui kebijakan - kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan hingga tahun 2026. Guna mengoptimalkan pelayanan Perangkat Daerah menuju pencapaian Rencana Strategis periode 2024-2026 dilakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026. Perubahan berbagai kebijakan secara otomatis menyebabkan beberapa penyesuaian baik itu pada sasaran pembangunan, arah kebijakan maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode pertama (satu), yang mana merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD-P, yang akan

memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran dan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya. Dengan muatan renja seperti; program-program, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan maju atau kebutuhan dana untuk tahun berikut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
19. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu khususnya pada penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan Timur guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah, maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, meliputi :

- a. Menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026;
- b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Sebagai *input* dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur khususnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Memberikan arah kebijakan dan strategi bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2024-2026 yang dimanifestasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan;
- e. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh aparatur jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penyesuaian pendanaan pagu indikatif;
- f. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi Pembangunan baik antar dinas/instansi terkait, antar Pemerintah

Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- g. Memberikan dasar dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. Menciptakan iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*) dan dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas (*Performance Accountability Report*);
- i. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga usaha dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala Badan (Kaban)/ Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kalimantan Timur berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENJA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja.

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pencapaian Renja Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K	RP		K	RP			K	RP
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85	Indeks	21.293.936.351	60.62	11.139.700.638			71	52,31
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	80	%		40				50	
1.02.001.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah	100	%	1.385.566.520	38.10	501.269.325			38.10	61,70

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K		RP	K	RP			K	RP
		Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja									
1 05 01 101 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	308.852.520	4	190.567.133			66.67	61,70
1 05 01 101 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen RKA – SKPD	1	Dokumen	51.230.000	1	0			100	0,00
1 05 01 101 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	42.160.000	0	0			0	0,00
1 05 01 101 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	3.620.000	1	0			100	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K	RP		K	RP			K	RP
1 05 01 101 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	3,540,000	0	0				
1 05 01 101 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	495,614,000	4	247.481.306,00			66.67	49,93
1 05 01 101 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	480,550,000	1	63.220.886,00			33.33	13,16
1 05 01 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	%	11.108.140.324	57.14	6.037.910.782			57.14	54,36
1 05 01 102 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	Org/Bln	10.486.802.204,00	43	5.879.150.337			100	56,06
1 05 01 102 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	324.000.000,00	6	106.600.000			50	32,90

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K	RP		K	RP				K
1 05 01 102 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	99.252.400,00	6	0			50	0
1 05 01 102 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12	Dokumen	124.689.300,00	6	49.808.600			50	39,95
1 05 01 102 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	Dokumen	27.639.640,00	6	1.997.000			50	7,23
1 05 01 102 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	26.379.380,00	6	354.845			50	1,35
1 05 01 102 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	19.377.400,00	6	0			50	0
1 05 01 103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	69.182.000	66.67	14.000.000			66.67	20,24
1 05 01 103 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	2.712.000	1	0			100	0
1 05 01 103 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan	1	Dokumen	59.820.000	1	14.000.000			100	23,40

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K		RP	K	RP			K	RP
		Barang Milik Daerah SKPD									
1 05 01 103 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	6.650.000	1	0			0	0
1 05 01 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	%	292.324.424,00	5	0			5	0
1 05 01 105 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	1	Paket	500.000,00	0	0			0	0
1 05 01 105 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen	2.712.000,00	1	0			25	0
1 05 01 105 0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	2.712.000,00	0	0			0	0
1 05 01 105 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	Orang	112.212.624	0	0			0	0
1 05 01 105 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	25	Orang	174.187.800	0	0			0	0
1 05 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas	100	%	1.476.561.407	36.14	533.836.675			36.14	36,15

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K	RP		K	RP			K	RP
		Operasional Kantor									
1 05 01 106 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.481.884	1	3.324.600			100	35,06
1 05 01 106 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	Paket	149.499.388	2	59.110.000			20	39,54
1 05 01 106 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	22	Paket	327.210.183	3	71.657.500			13.64	21,90
1 05 01 106 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	70.286.400	4	28.196.000			57.14	40,12
1 05 01 106 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145	Laporan	788.088.000	66	354.750.075			45.52	45,01
1 05 01 106 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa Arsip Dinamis pada SKPD	6	Dokumen	124.795.312	1	16.798.500			16.67	13,46
1 05 01 106 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	7.200.240	0	0			0	0
1 05 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas	100	%	1.854.819.744	100	1.849.900.000			100	99.73

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K	RP		K	RP				K
		Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		K	RP	K	RP			K	RP
1 05 01 107 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	20.000	0	0			0	0
1 05 01 107 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	1.854.799.744	5	1.849.900.000			100	99.74
1 05 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor (%)	100	%	4.281.672.032	45	1.945.157.526			45	45.43
1 05 01 108 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.590.000	0	0			0	0
1 05 01 108 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	574.425.900	6	182.612.392			50	31.79
1 05 01 108 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor disedikan	12	Laporan	3.705.656.132	6	1.762.545.134			50	47.56
1 05 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan	100	%	825.669.900	30	257.626.330			30	31,20

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K		RP	K	RP			K	RP
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik									
1 05 01 109 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	44	Unit	477.619.000	19	224.532.930			43.18	47,01
1 05 01 109 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	173	Unit	82.662.900	72	33.093.400			41.62	40,03
1 05 01 109 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	Unit	12.498.000	0	0			0	0
1 05 01 109 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1	Unit	252.890.00	0	0			0	0
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Penangana Pra Bencana	100	%	7.381.929.688	50	1.970.338.810			50	26,69
		Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	%		50				50	
		Presentase Pemulihan Pascabencana	100	%		50				50	
1 05 03 101	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kab/kota	100	%	168.400.000	0	26.725.482			0	15,87
1 05 03 101 0002	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Provinsi Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE	20	Orang	168.400.000	0	26.725.482			0	15,87

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K	RP		K	RP			K	RP
		Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota									
1 05 03 102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	%	2.833.072.688	21.43	433.198.635			21.43	15,29
1 05 03 102 0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1	Dokumen	127.235.000	1	109.674.180			100	86,20
1 05 03 102 0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2	Kawasan	319.800.000	0	133.142.814			0	41,63
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan	12	Dokumen	1.512.655.688	6	184.402.841			50	12,19

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K	RP		K	RP				K
		terhadap bencana									
1 05 03 102 0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30	Orang	254.600.000	0	0			0	0
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20	Orang	187.000.000	0	0			0	0
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	400	Orang	190.600.000	0	0			0	0
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di	60	Unit	241.182.000	0	5.978.800			0	2,48

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K	RP		K	RP				K
		kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana									
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	%	1.508.860.000	33.33	660.588.269			33.33	43,78
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10	Laporan	418.400.000	5	226.339.529			50	54,10
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12	Laporan	271.548.423	6	87.270.500			50	32,14
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800	Orang	818.911.577	0	346.978.240			0	42,37
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	%	2.871.597.000	34.29	849.826.424			34.29	29,59
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60	Keluarga	108.818.000	0	12.322.885			0	11,32
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian	5	Dokumen	1.778.000.000	2	576.323.319			40	32,41

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd			Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)	(7)	(8)	
			K		RP	K	RP			K	RP
		Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun									
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	Dokumen	99.000.000	1	77.905.595			100	78,69
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1	Dokumen	182.200.000	0	22.382.200			0	12,28
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2	Dokumen	239.600.000	0	53.322.755			0	22,25
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2	Dokumen	90.600.00	0	0			0	0
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan	10	Kab/Kota	373.379.000	10	107.569.670			100	28,81

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Apbd		Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
					Triwulan 2					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	
			K	RP	K	RP			K	RP
		Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota								
GRAND TOTAL					28.675.866.039		13.110.039.448			36.4 45,72

Pelaksanaan rencana kerja perubahan 2024, baru dalam terhadap pelaksanaan kegiatan pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sehingga target yang ditetapkan akan dapat terealisasi pada pertengahan tahun kegiatan atau menjelang akhir anggaran. Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan rincian pelaksanaan dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Program Penanggulangan Bencana, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur, dimana proses ataupun tahapan pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Upaya – upaya yang sekarang menjadi perhatian diantaranya adalah dengan meningkatkan evaluasi atas capaian kegiatan secara berkala setiap triwulan atas progres pelaksanaan kegiatan dan tentunya dari hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan beberapa kebijakan penyelesaian serta menjadi bahan pertimbangan atas penentuan target kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Di samping evaluasi capaian kinerja tersebut, BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga telah membangun komitmen internal bersama yang harus dipedomani dan dipatuhi setiap proses pelaksana kegiatan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta Rencana Aksi Kegiatan (RAK) termasuk dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban keuangan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPD 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkait investasi suatu wilayah atau kawasan yang memberikan keadaan kondusif terkait manajemen penanggulangan bencana pada wilayah atau kawasan pembangunan.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan upaya mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, pemaduan program/kegiatan/sub kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
3. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana saat tanggap darurat bencana dan pascabencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini, serta manajemen data dan informasi kebencanaan.
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

NO.	INDIKATOR SPM/IKK	TARGET 2023	REALISASI 2023	CATATAN ANALISIS
1	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	100 %	Tersedianya dok. KRB dan RPB yang
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	100 %	Tersedianya dok. Kajian Risiko Bencana (KRB) priode dan Dok. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2023-2027
3	Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %	100 %	Seluruh Kab/Kota yg ada di Provinsi Kalimantan Timur yang telah terfasilitasi Penanganan Pra Bencana
4	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	Terfasilitasi Penanganan Bencana 2 kejadian berstatus Tanggap Darurat Banjir di Logkali dan Kebakaran TPA

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditahun 2021-2023, melalui capaian target indikator Program Penanggulangan Bencana yaitu prosentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana yang bertujuan untuk membentuk tingkat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tingkat ketangguhan yang dimaksud adalah dengan upaya membentuk kemandirian melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemenuhan standarisasi peralatan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan Operasional (perahu, tenda dll).

Untuk mencapai tingkat kemandirian di tengah masyarakat (mampu beradaptasi dan tanggap dalam evakuasi dan penyelamatan) maka, dalam menentukan calon prioritas, diperlukan langkah strategi yang harus segera diambil, mengingat jumlah desa/kelurahan yang berada di Wilayah rawan bencana di provinsi Kalimantan Timur cukup banyak. Ukuran prioritas desa atau kelurahan yang dibentuk adalah desa/kelurahan yang pastinya mengacu

pada data dan informasi dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)) dan beberapa masukan Informasi dari Kabupaten/Kota, dengan dasar tersebut bahwa, ukuran prioritas bukan hanya mengacu pada tingkat kerawanan saja, namun juga mengacu pada tingkat kerentanan terhadap ketahanan pangan, ekonomi, pariwisata dan sosial bahkan politik (Destana sebagai bagian dari daerah penyangga Ibu Kota Nusantara).

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023, Destana ini menjadi Program Prioritas Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, dan harus segera dibentuk sebanyak 30 Unit selama masa priode jabatan, dan sampai dengan akhir tahun 2023 BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk 30 Destana atau capaian target 100%, yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda Balikpapan dan Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat.

Selain sasaran program pembentukan Destana, BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pelaksanaan terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana ada 3 yang menjadi bahan laporan :

1. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

Dimana yang menjadi Indikator Kuncinya adalah tersediannya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen yang menyajikan data dan informasi tingkat risiko bahaya pada suatu daerah dan Tersediannya Dok. Renacana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai dokumen acuan penanganannya bagi pemegang kewenangan lintas multisektor. dan telah dilaksanakan 100 %

2. Persentase Penanganan Pra Bencana yang menjadi indikator kuncinya adalah terfasilitasinya 10 wilayah baik Kabupaten maupun Kota terhadap pelayanan pemenuhan informasi kebencanaan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, serta Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dan terealisasi 100 %.
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Indikator Kuncinya adalah penanganan tanggap darurat yang ditetapkan oleh daerah dan di tahun 2023 ada 2 kejadian bencana yang telah ditetapkan oleh kepala daerah yakni Tanggap Darurat Banjir di Logkali Kabupaten Paser dan dan Kebakaran TPA di Kota Samarinda dan tertangani 100 %.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Tingkat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan

kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;

- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- 7) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Rencana kerja Perangkat Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026, termasuk pada penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, maka sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan 2 (Dua) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu :

- 1) Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

- 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana**, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, keadaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana. Dalam penyelenggaraan masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat selanjutnya; (3) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (4) Penilaian kerusakan dan kerugian

pascabencana yang belum akurat; (5) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (6) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (7) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

- 2) **Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

- 3) **Meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya**, hal yang sama tentu diikuti dengan dampak yang ditimbulkan. Perlu adanya pengembangan kemandirian masyarakat dalam upaya menghadapi bencana

c. Dampak terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RPD) 2024 - 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan dasar penyusunan kebijakan, program, indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang (2024-2026) adalah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran dari Rencana kerja Perangkat Daerah (RPD) melingkupi **Tujuan 4** "Mewujudkan Birokrasi Pemerintah berAKHLAK yang berorientasi pada Pelayanan Publik", dengan **Sasaran 11** "Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel". Untuk mewujudkan tujuan yang telah di rumuskan, maka ada 2 (dua) hal yang perlu dicapai dalam penanggulangan bencana terhadap tingkat risiko provinsi kalimantan timur terhadap bencana dan mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Disamping permasalahan-permasalahan seperti pada poin b diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangan serta mengembangkan *sains* (pengetahuan), teknologi dan informasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Meningkatkan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Instansi Pusat dan maupun Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan fasilitasi, bantuan teknis dan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan menambah sarana prasarana penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Memperluas kerjasama dengan Pemerintah, TNI/ POLRI, Akademisi, Swasta, LSM, Ormas, dan masyarakat (*Pentaheliks*) untuk penanggulangan bencana.
- 5) Membuat, memperbanyak dan mendistribusikan kepada masyarakat pedoman-pedoman singkat yang mudah dimengerti tentang cara penyelamatan dalam menghadapi atau saat bencana.
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

- 7) Mendayagunakan kemampuan secara maksimal dengan melibatkan peran *Pentahelix*, melakukan mobilisasi, modifikasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi sosial ekonomi yang dapat memberikan dampak timbulnya bencana.
- 8) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kebencanaan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana melalui media.
- 9) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang handal dan memadai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kebencanaan yang baik.
- 10) Mengembangkan inovasi untuk sosialisasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap usaha-usaha penanggulangan bencana, baik pada saat tidak ada bencana, tanggap darurat maupun pascabencana.
- 11) Mendayagunakan kapasitas yang ada dan sarana prasarana yang tersedia untuk promosi kegiatan penanggulangan bencana.
- 12) Menganalisis data dan informasi *hazard* dan risiko yang ada untuk mengkaji perubahan kondisi sosial-ekonomi yang dapat berdampak negatif ataupun menimbulkan bencana.

2.4 REVIEW TERHADAP RENJA-P RKPD

Renja-P 2024 mengacu pada realisasi anggaran Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Telaah terhadap Rencana Kerja Perubahan RKPD-P dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan RKPD-P Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. *Review* terhadap Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Lampiran Tabel 2.3

Tabel 2.3 Renja Perubahan Tahun 2024
BPBD Provinsi Kalimantan Timur

No.	Rencana Kerja RKPD-P					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	21.293.936.351	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85	22.986.878.928
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yg ditindaklanjuti	80 %				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yg ditindaklanjuti	80 %	
JUMLAH					21.293.936.351					22.986.878.928
2	Program Penanggulangan Bencana	Prov. Kaltim	Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %	7.381.929.688	Program Penanggulangan Bencana	Prov. Kaltim	Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %	73.205.884.356
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat	100 %				Persentase Penanganan Tanggap Darurat	100 %	
			Persentase Penanganan Pemulihan Pascabencana	100 %				Persentase Penanganan Pemulihan Pascabencana	100 %	
JUMLAH					7.381.929.688					73.205.884.356
PAGU ANGGARAN					28.675.866.039					96.192.763.284

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026, yang kemudian akan dipaparkan melalui forum perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama

Perangkat Daerah lain yaitu khususnya ditekankan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan yang langsung ke masyarakat, pada tabel 2.4

Tabel 2.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pelayanan ke Masyarakat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Keterangan
I	Program Penanggulangan Bencana				
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	
	penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi Kaltim	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 kawasan	Penguatan Destana, SAB,
	gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	2 Laporan	Warga dan Aparatur yang terlibat dalam kesiapsiagaan
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	60 unit	APD bagi Relawan
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	Penanganan bencana bagi masyarakat terdampak bencana
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	12 Laporan	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	Penyediaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	
	pelatihan keluarga tanggap bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	60 keluarga	Keluarga yang mendapatkan edukasi tanggap bencana

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ditingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Sekretariat Utama dan bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melaksanakan amanat Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada *upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.*

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, pasal 3 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi; asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan

bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; *non*-diskriminatif; dan *non*-proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana kewenangan pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku SKPD yang bergerak di bidang kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berpedoman kepadanya.

Dalam situasi normal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih menjalankan fungsi koordinasi dan

pelaksana kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan.

Dalam situasi darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat dalam situasi tanggap darurat bencana.

Dalam situasi pascabencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor dan unsur masyarakat. Pembagian peran di antara para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana juga akan menjadi hal yang diatur melalui Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Rencana Kinerja Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak lepas dari tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah dirumuskan yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026, dimana sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam capaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) transisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. yaitu Tujuan 4 "Mewujudkan

Birokrasi Pemerintah berAKHLAK yang berorientasi pada Pelayanan Publik, dengan Sasaran 11 "Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel", maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2024 - 2026) memiliki 2 tujuan yaitu:

"Pengurangan Risiko bencana", melalui peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang terfokus pada 7 (tujuh) peningkatan penanggulangan bencana diantaranya adalah 1) **Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan**, hal ini melingkupi dasar hukum/peraturan Penanggulangan Bencana, penguatan kelembagaan, termasuk membangun komitmen bersama DPRD dalam pengurangan risiko bencana; 2) **Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu**, dimana penyajian informasi terkait dengan bahaya, kerentanan, dan kapasitas serta potensi dampak kerugian akibat bencana yang termuat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan arah kebijakan dan rencana dari aspek kebencanaan yang termuat dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB); 3) **Pengembangan Sistem Informasi Diklat Dan Logistik**, melingkupi kegiatan pada sarana penyampaian informasi, sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan, gladi, peningkatan fungsi dari Pusat Pengendali Operasional (PUSDALOPS), meningkatkan sistem informasi yang terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana, termasuk kebutuhan tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara kualitas dan kuantitas; 4) **Penanganan tematik Kawasan Rawan Bencana**, melingkupi penataan tata ruang provinsi dan kab/kota yang sudah mempertimbangkan terhadap pengurangan risiko bencana, peningkatan edukasi manajemen dan pengenalan risiko bencana di tingkat pendidikan,

masyarakat dan safety hospital berkaitan dengan kajian keterpaparan acaman, representatif keamanan gedung/bangunan dan sarana prasarana rumah sakit;

5) **Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana**, pada potensi ancaman bencana dengan melakukan restorasi sungai, penguatan lereng, penerapan bangunan, revitalisasi tanggul/waduk, konservasi vegetasi dan restorasi lahan gambut; 6) **Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana**, melingkupi pada identifikasi dan penyusunan rencana kedepan terhadap perjenis bencana yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi dan menjadi dasar untuk penentuan status tanggap darurat serta penerapan sistem komando operasi darurat; serta 7) **Pengembangan Sistem pemulihan bencana**, melingkupi prabencana terhadap pelayanan dasar, infrstruktur penting, perbaikan rumah yang terdampak, serta pemulihan penghidupan masyarakat (livelihood). Tujuan keduanya dari Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 adalah **"Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas"**, melalui peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result Oriented goverment*). Pada peningkatan pada kualitas perencanaan, pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, laporan kinerja, evaluasi kinerja internal atau output dan outcome serta kinerja lainnya.

Maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam waktu 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,733
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	71,00 (BB)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan serta anggaran yang tersedia. Usulan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 meliputi, yaitu :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan meliputi antara lain:

3.3.1.1 Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat pada Umum, Perencanaan Program dan Keuangan ;

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah
2. Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
3. Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD
4. Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
5. Penyusunan koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Gaji pokok dan tunjangan pegawai
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah sub kegiatan terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik kantor
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
4. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

3.3.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya dalam kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana Tahun 2025, berdasarkan kepada bidang pelaksana adalah:

3.3.2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

3.3.2.1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

3.3.2.2 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik

2. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana

3.3.2.3 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. Penanganan Pascabencana Provinsi
2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah
4. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
5. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam PB
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
7. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sebelum	Indikator Kinerja Sesudah	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah
1	2	3	4	6	7	8	9
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80%	100%	21.293.936.351	22.986.878.928
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85Indeks	82 Indeks		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	1.385.566.520	1.385.566.520
1.05.01.1.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	308,852,520	308,852,520
1.05.01.1.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	51,230,000	51,230,000
1.05.01.1.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	42,160,000	42,160,000
1.05.01.1.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,620,000	3,620,000
1.05.01.1.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,540,000	3,540,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sebelum	Indikator Kinerja Sesudah	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah
1	2	3	4	6	7	8	9
1.05.01.1.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	495,614,000	495,614,000
1.05.01.1.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	480,550,000	480,550,000
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	11,108,140,324	12.801.082.901
1.05.01.1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	10,486,802,204	12.160.274.781
1.05.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	324,000,000	343.470.000
1.05.01.1.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	99,252,400	99,252,400
1.05.01.1.02.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	124,689,300	124,689,300
1.05.01.1.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	27,639,640	27,639,640
1.05.01.1.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	26,379,380	26,379,380

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sebelum	Indikator Kinerja Sesudah	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah
1	2	3	4	6	7	8	9
1.05.01.1.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	19,377,400	19,377,400
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	69,182,000	69,182,000
1.05.01.1.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,712,000	2,712,000
1.05.01.1.03.00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	59,820,000	59,820,000
1.05.01.1.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6,650,000	6,650,000
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	100 %	292,324,424	292,324,424
1.05.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	500,000	500,000
1.05.01.1.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	2,712,000	2,712,000
1.05.01.1.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	2,712,000	2,712,000
1.05.01.1.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	112,212,624	112,212,624

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sebelum	Indikator Kinerja Sesudah	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah
1	2	3	4	6	7	8	9
1.05.01.1.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	174,187,800	174,187,800
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	100 %	1,476,561,407	1,476,561,407
1.05.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,481,884	9,481,884
1.05.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	149,499,388	149,499,388
1.05.01.1.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	327,210,183	327,210,183
1.05.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	70,286,400	70,286,400
1.05.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	145 Laporan	788,088,000	788,088,000
1.05.01.1.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	124,795,312	124,795,312
1.05.01.1.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7,200,240	7,200,240
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	100 %	1,854,819,744	1,854,819,744

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sebelum	Indikator Kinerja Sesudah	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah
1	2	3	4	6	7	8	9
1.05.01.1.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20,000	20,000
1.05.01.1.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	1,854,799,744	1,854,799,744
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	100 %	4,281,672,032	4,281,672,032
1.05.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1,590,000	1,590,000
1.05.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	574,425,900	574,425,900
1.05.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,705,656,132	3,705,656,132
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	825,669,900	825,669,900
1.05.01.1.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44 Unit	477,619,000	477,619,000
1.05.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	173 Unit	82,662,900	82,662,900
1.05.01.1.09.00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	12,498,000	12,498,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sebelum	Indikator Kinerja Sesudah	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah
1	2	3	4	6	7	8	9
1.05.01.1.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	252,890,000	252,890,000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	7.381.929.688	69.812.459.688
		Persentase Pemulihan Pasca Bencana		100 %			
		Persentase Penanganan Pra Bencana		100 %			
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	100 %	168,400,000	168,400,000
1.05.03.1.01.00 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	168,400,000	168,400,000
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	2,833,072,688	2,833,072,688
1.05.03.1.02.00 12	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen	127,235,000	127,235,000
1.05.03.1.02.00 13	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	319,800,000	319,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sebelum	Indikator Kinerja Sesudah	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah
1	2	3	4	6	7	8	9
1.05.03.1.02.00 14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	1,512,655,688	36.943.185.688
1.05.03.1.02.00 15	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	30 Orang	254,600,000	254,600,000
1.05.03.1.02.00 16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	20 Orang	187,000,000	187,000,000
1.05.03.1.02.00 19	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	400 Orang	400 Orang	190,600,000	190,600,000
1.05.03.1.02.00 21	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Unit	60 Unit	241,182,000	241,182,000
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	1,508,860,000	1,508,860,000
1.05.03.1.03.00 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	10 Laporan	418,400,000	418,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sebelum	Indikator Kinerja Sesudah	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah
1	2	3	4	6	7	8	9
1.05.03.1.03.00 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	12 Laporan	271,548,423	271,548,423
1.05.03.1.03.00 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang	818,911,577	818,911,577
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	2,871,597,000	29.879.997.000
1.05.03.1.04.00 06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	60 Keluarga	108,818,000	108,818,000
1.05.03.1.04.00 07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	1,778,000,000	28.778.000.000
1.05.03.1.04.00 16	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	99,000,000	99,000,000
1.05.03.1.04.00 17	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	182,200,000	182,200,000
1.05.03.1.04.00 18	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	2 Dokumen	239,600,000	239,600,000
1.05.03.1.04.00 19	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	2 Dokumen	90,600,000	90,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sebelum	Indikator Kinerja Sesudah	Target Capaian Kinerja Sebelum	Target Capaian Kinerja Sesudah	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sesudah
1	2	3	4	6	7	8	9
1.05.03.1.04.00 20	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 Kab/kota	10 Kab/kota	373,379,000	373,379,000
GRAND TOTAL						28.675.866 .039	92.799.338.6 16

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPBD) Tahun 2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, sebagai tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Transisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Rencana Kerja Perubahan 2024 ini akan memberikan peran dalam meningkatkan koordinasi berkaitan dengan tugas-tugas kebencanaan dan senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi masyarakat umum terutama masyarakat Kalimantan Timur. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian dalam Rencana Kerja Perubahan 2024 ini yaitu :

1. Pelaksanaan yang didasarkan / berbasis pada kinerja, maka alokasi penganggaran seharusnya mengikuti program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanahkan oleh Permendagri No 101/2018 tentang tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota dan Permendagri No. 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Mengoptimalkan fungsi kinerja BPBD melalui kolaborasi program dan kegiatan melalui penguatan jaringan (*networking*) antar pemerintah/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat, serta mendorong penggunaan anggaran yang bersumber selain dari APBD Provinsi Kalimantan Timur (DBH, FCPF, dan sumber anggaran lainnya).

Kedepannya, BPBD Provinsi Kalimantan Timur masih perlu menyesuaikan / perbaikan terhadap Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai masukan dan pertimbangan untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala Pelaksana

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508141998031006